KAMPUS AKADEMIK PUBLISHER

Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi Vol.1, No.2 Juli 2024

e-ISSN: 3047-6240; p-ISSN: 3047-6232, Hal 491-502

DOI: https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.228





FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT IMPOR KOMODITAS BERAS INDONESIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEIMBANGAN EKONOMI

(FACTORS AFFECTING THE LEVEL OF IMPORTS OF INDONESIAN RICE COMMODITIES AND ITS IMPACT ON THE ECONOMIC BALANCE)

Mahayu Mawar Kalista¹, Emia Rehulina BR Bangun², Balqis Sabila³, Sandrina Dewi Lestari⁴, Bagas Azhar Saputra⁵

¹Manajemen Agribisnis, Sekolah Vokasi, IPB UNIVERSITY, Indonesia Alamat email: kalistamawar@apps.ipb.ac.id, rehulinabangun25emia@apps.ipb.ac.id, aadinnrssandrina@apps.ipb.ac.id, balqissabila@apps.ipb.ac.id, bagasazhar@apps.ipb.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes the factors influencing the level of rice imports in Indonesia and their impact on national economic balance. In the context of globalization and an open economy, Indonesia faces challenges in food security, particularly related to rice production and consumption. Data from the Central Bureau of Statistics (BPS) show fluctuations in rice imports from various countries during the period 2017-2023, with Thailand as the main supplier. The analysis indicates that domestic rice production, consumption, exchange rates, and local rice prices significantly affect import levels. Although rice imports can help stabilize prices and ensure food availability, negative impacts such as pressure on local farmers and trade balance deficits must also be considered. Government policies including import tariffs, quotas, and quality standards are crucial in managing imports and maintaining economic balance. This study employs a descriptive qualitative approach with secondary data analysis and literature review to provide a comprehensive understanding of the dynamics of rice imports in Indonesia.

Key words: Economic Balance, Government Policy, Import, Rice

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat impor beras di Indonesia dan dampaknya terhadap keseimbangan ekonomi nasional. Dalam konteks globalisasi dan perekonomian terbuka, Indonesia menghadapi tantangan ketahanan pangan, khususnya terkait produksi dan konsumsi beras. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan fluktuasi impor beras dari berbagai negara selama periode 2017-2023, dengan Thailand sebagai pemasok utama. Analisis

menunjukkan bahwa produksi beras domestik, konsumsi, nilai tukar, dan harga beras lokal secara signifikan mempengaruhi tingkat impor. Meskipun impor beras dapat membantu menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan pangan, dampak negatif seperti tekanan pada petani lokal dan defisit neraca perdagangan juga perlu diperhatikan. Kebijakan pemerintah yang mencakup tarif bea masuk, kuota, dan standar kualitas sangat penting dalam mengelola impor dan menjaga keseimbangan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis data sekunder dan studi pustaka untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika impor beras di Indonesia.

Kata kunci: Beras, Impor, Kebijakan Pemerintah, Keseimbangan Ekonomi

PENDAHULUAN

Negara di seluruh dunia sudah merasakan globalisasi menyebabkan hampir di setiap negara telah menerapkan perekonomian terbuka. Masing-masing negara telah membuka diri melakukan perdagangan secara internasional, pada dasarnya setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Hal ini , mengakibatkan negara saling membutuhkan satu sama lain dan membuka kesempatan untuk melakukan kerja sama atau perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan penduduk antar negara dengan dibatasi oleh peraturan

Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang yang menghadapi persoalan di bidang pertanian, khususnya persoalan pangan. Pangan adalah kebutuhan dasar yang paling penting bagi manusia untuk mempertahankan hidup. Jika tidak adanya pangan manusia tidak mungkin dapat melangsungkan hidup dan kehidupannya dan bermasyarakat (Sari, 2014).

Dari sudut pandang ketahanan pangan, beras merupakan prioritas dalam kebijakan pembangunan pertanian pemerintah. Kebijakan swasembada beras merupakan salah satu kebijakan utama pembangunan pertanian dan dinilai telah meningkatkan produksi beras dan pendapatan petani. Indonesia telah berjuang untuk mencapai swasembada beras dalam beberapa tahun terakhir,namun hal itu baru tercapai pada pertengahan tahun 1980-an dan tahun 2008 hingga 2009 yang lalu. (Sri Endang Rahayu, Mukmin Pohan, 2016)

Dalam konteks ketahanan pangan, yang paling penting bukan hanya apakah masyarakat memiliki akses terhadap bahan-bahan dasar, namun juga apakah semua anggota masyarakat memiliki dan mempunyai akses terhadap pangan.Dalam hal pemenuhan permintaan beras, Indonesia berupaya menemukan keseimbangan antara upaya memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri melalui peningkatan produktivitas dan impor beras, serta upaya menstabilkan harga beras pada harga yang terjangkau oleh semua pihak (Sari, 2014).

Pada tahun 1984 hingga 1986, Indonesia mampu swasembada beras namun kini menjadi negara pengimpor beras. Pada tahun 2005, Indonesia merupakan produsen beras

terbesar ketiga setelah China dan India. Hal ini menunjukkan berapa banyak beras yang diproduksi oleh Indonesia saat itu. Indonesia pernah menjadi salah satu negara penghasil beras terkemuka di dunia. Di tahun 2014, Indonesia menjadi produsen beras terbesar di dunia setelah China dan India (Sri Endang Rahayu dan Mukmin Pohan, 2016). Namun dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia harus mengimpor sekitar 3 juta ton beras setiap tahunnya, terutama dari Thailand dan Vietnam, untuk menjamin cadangan berasnya sendiri (Febriaty, 2016).

KAJIAN TEORI

1. Tinjauan Tentang Impor

Impor merupakan masuknya sejumlah barang dan jasa ke dalam pasar negara untuk keperluan konsumsi, bahan modal, atau bahan baku produksi dalam negeri (Christianto, 2013). Kegiatan impor dilakukan dengan adanya pelaku seperti importir dan eksportir atas barang atau jasa, para pelaku tersebut berada dalam dua negara yang berbeda (Amir, 2001). Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 Barang yang akan beredar secara bebas di dalam negeri, terutama di wilayah pabean, atau yang akan diimpor dari luar negeri atau wilayah pabean, akan dikenakan bea masuk kecuali jika dibebaskan atau mendapatkan pembebasan. Di samping itu, pihak individu atau perusahaan yang diakui oleh pemerintah sebagai importir memiliki kewajiban untuk membayar bea masuk dan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kemampuan atau kapasitas suatu negara dalam menciptakan barang yang bersaing dengan produk luar negeri dapat mempengaruhi jumlah impor yang diperlukan. Dengan kata lain, jumlah impor bisa mempengaruhi peningkatan nilai pendapatan nasional suatu negara. Jika pendapatan nasional meningkat tetapi kemampuan dalam menghasilkan barang berkualitas terbatas, ini bisa menjadi alasan untuk tingginya impor. Keuntungan dari dilakukannya impor adalah akan memenuhi ketersediaan barang pada negara yang produksinya rendah namun, Menurut Sukirno (1996) kegiatan impor dapat menciptakan aliran pengeluaran untuk mendapatkan barang dari luar negeri yang berakibat pada turunnya pendapatan nasional serta memperumit situasi ekonomi negara yang bersangkutan.

2. Keseimbangan Ekonomi

Variabel makro ekonomi yang mewakili permasalahan utama adalah pertumbuhan output, inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran (Stiglitz, 1997; Dornbusch et al., 1998). Variabel ekonomi makro tersebut saling berkaitan melalui pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja, dan pasar saham sehingga membentuk keseimbangan internal (macro equilibrium) dan keseimbangan eksternal.

Kegagalan panen di negara-negara dimana pengeluaran non pangan menyumbang proporsi yang tinggi terhadap pengeluaran pangan nasional mempunyai implikasi makro ekonomi.

Kegagalan panen cenderung menyebabkan harga pangan lebih tinggi. Dengan asumsi hanya ada dua sektor dalam perekonomian, pangan dan non pangan. Ini berimplikasi pengeluaran untuk pangan meningkat dan akan berimbas ke sektor non pangan berupa penurunan harga dan inflasi akan meningkat. Sebaliknya, jika ada kenaikan produksi pangan. Dengan demikian, fluktuasi panen akan menyebabkan instabilitas, baik bagi konsumen beras, petani padi, maupun produsen manufaktur.

Terlihat bahwa kegagalan panen dan masa panen dapat mempengaruhi kondisi ekonomi makro melalui berbagai jalur, seperti inflasi, suku bunga bank, pertumbuhan ekonomi, investasi, kurva produksi agregat, dan penawaran uang. Untuk memprediksi dampak kegagalan panen atau masa panen terhadap stabilitas ekonomi makro pemerintah menerapkan kebijakan harga pangan.

1. Peran kebijakan pemerintah terhadap impor

Peran pemerintah terhadap kebijakan impor meliputi:

1. Penetapan Tarif Bea Masuk

Menetapkan tarif bea masuk untuk barang impor untuk mengatur aliran barang dan melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing.

2. Kuota impor

Batasan kuantitas barang yang dapat diimpor dalam periode tertentu, untuk mengendalikan impor dan menjaga keseimbangan perdagangan.

3. Larangan Impor

Melarang impor barang tertentu yang dianggap merugikan industri dalam negeri atau bertentangan dengan kepentingan nasional.

4. Pengaturan Standar Kualitas

Mengatur standar kualitas untuk barang impor guna melindungi konsumen dan industri dalam negeri dari produk yang tidak memenuhi standar.

5. Pemberian Insentif Impor

Pembebasan bea masuk atau subsidi, untuk impor barang-barang tertentu yang dianggap penting untuk pembangunan ekonomi atau industri dalam negeri.

6. Penegakan Hukum

Pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran aturan impor

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara rinci dan mendalam berdasarkan data yang ada. Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari

berbagai sumber terpercaya, salah satunya adalah Badan Pusat Statistik (BPS) dengan rentang waktu pengambilan data dari tahun 2020 hingga 2023. Selain itu, penelitian ini juga mengandalkan studi pustaka yang mencakup literatur ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, perundang- undangan terkait, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan topik penelitian (Soerjono).

Dalam penelitian ini, metode pendekatan perundang-undangan juga digunakan untuk menelaah dan memahami konsep kebijakan impor di Indonesia. Dengan menelaah kebijakan yang ada, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai regulasi dan prosedur yang berlaku dalam proses impor di Indonesia (Jhonny, 2007). Pendekatan ini penting untuk memahami konteks legal dan administratif yang mempengaruhi dinamika impor

Studi literatur dilakukan untuk mendapatkan landasan teori yang memadai, yang dapat mendukung analisis data dan interpretasi temuan penelitian. Melalui studi literatur, peneliti mengkaji berbagai teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian, serta mengevaluasi hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dapat memberikan wawasan tambahan. Landasan teori yang kuat sangat penting untuk memastikan bahwa analisis penelitian didasarkan pada kerangka konseptual yang jelas dan terstruktur.

Selain itu, data lapang yang diperoleh melalui keterbukaan informasi publik juga digunakan untuk memperkaya analisis. Keterbukaan informasi publik memungkinkan peneliti untuk mengakses data dan informasi yang tersedia secara umum, sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam mengenai isu yang diteliti. Data ini kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi yang ada, serta untuk mengidentifikasi pola-pola yang relevan dalam konteks penelitian.

Dengan menggabungkan metode kualitatif deskriptif, studi pustaka, pendekatan perundang-undangan, dan analisis data lapang, penelitian ini berusaha untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai topik yang diteliti. Metodologi yang beragam ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang valid dan dapat diandalkan, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Data Impor Beras

Tabel 1. Impor Beras Menurut Negara Asal Utama Tahun 2017 - 2023

sumber: BPS (diolah)

Negara Asal	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Berat Bersih: Ton							
India	32.209,70	337.999,00	7.973,30	10.594,40	215.386,50	178.533,60	69.715,70
Thailand	108.944,80	795.600,10	53.278,00	88.593,10	69.360,00	80.182,50	1.381.921,20
Vietnam	16.599,90	767.180,90	33.133,10	88.716,40	65.692,90	81.828,00	1.147.705,30
Pakistan	87.500,00	310.990,00	182.564,90	110.516,50	52.479,00	84.407,00	309.309,70
Myanmar	57.475,00	41.820,00	166.700,60	57.841,40	3.790,00	3.830,00	141.204,00
Jepang	72,1	0,2	90	0,3	230,3	56,1	61,5
Tiongkok	2.419,00	227,7	24,3	23,8	42,6	6	7
Lainnya	54,3	6,5	744,6	0,3	760,1	364,1	12.933,30
Total	305.274,80	2.253.824,40	444.508,80	356.286,20	407.741,40	429.207,30	3.062.857,60

Berdasarkan tabel di atas, impor beras di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang fluktuatif. Misalnya, dari tahun 2020 ke tahun 2021, jumlah beras yang diimpor

Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Namun, pada periode berikutnya, yaitu dari tahun 2021 ke tahun 2022, jumlah beras yang diimpor Indonesia justru mengalami peningkatan yang cukup tajam. Tren ini terus berlanjut hingga tahun 2023, di mana Indonesia mencatat jumlah impor beras tertinggi dalam enam tahun terakhir, yaitu sekitar 3,06 juta ton. Angka ini menunjukkan lonjakan yang cukup besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Indonesia banyak mengimpor beras dari beberapa negara, namun mayoritas pasokan beras impor berasal dari Thailand. Pada tahun 2023, Indonesia mengimpor sekitar 2,57 juta ton beras dari Thailand, yang merupakan jumlah terbesar dibandingkan negara-negara lain. Hal ini menunjukkan ketergantungan Indonesia yang cukup tinggi terhadap beras impor dari Thailand untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain Thailand, Indonesia juga mengimpor beras dari negara-negara lain seperti Vietnam, Pakistan, dan India, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil.

Fluktuasi impor beras ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi produksi beras domestik, kebijakan pemerintah terkait impor pangan, serta dinamika pasar internasional. Ketika produksi beras domestik menurun, pemerintah cenderung meningkatkan impor untuk memastikan ketersediaan beras yang cukup di pasar domestik. Sebaliknya, ketika produksi domestik meningkat, impor beras dapat dikurangi untuk melindungi petani lokal.

Selain itu, kebijakan perdagangan dan perjanjian internasional juga memainkan peran penting dalam menentukan volume dan sumber impor beras. Misalnya, perjanjian perdagangan dengan negara-negara penghasil beras utama dapat mempengaruhi harga dan ketersediaan beras impor. Dalam beberapa kasus, fluktuasi harga internasional dan

perubahan kondisi cuaca di negara-negara penghasil beras juga dapat mempengaruhi keputusan impor.

- 2. Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Impor Beras
- 2.1 Pengaruh Produksi Beras terhadap Impor Beras

Produksi Beras secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap impor beras di Indonesia tahun 2006-2020. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah beras yang dihasilkan, semakin rendah jumlah beras yang diimpor ke Indonesia atau semakin besar kemungkinan penurunan impor beras ke Indonesia. Sebaliknya jika produksi beras buruk mengakibatkan impor beras tinggi seperti yang terjadi di sebagian besar dunia. Pernyataan tersebut didukung oleh data yang diterbitkan BPS Indonesia (2021) dan Kementerian Pertanian RI (2021) menunjukkan bahwa produksi beras di Indonesia meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan konsumsi per kapita yang mengarah pada peningkatan permintaan komoditas beras dalam negeri, akan tetapi impor beras tidak terlalu tinggi karena diimbangi dengan produksi beras dalam negeri cukup tinggi. Namun jika diteliti lebih lanjut mengungkapkan bahwa ada surplus produksi beras setiap tahun, yang mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar beras lokal. Disisi lain, impor beras terus dilakukan yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan rantai pasokan dalam negeri.

2.2 Pengaruh Konsumsi Beras terhadap Impor Beras

Konsumsi Beras secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap impor beras di Indonesia tahun 2006-2020. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar konsumsi beras, maka semakin besar pula impor beras ke Indonesia atau terjadi peningkatan konsumsi beras. Sebaliknya jika konsumsi beras rendah, maka impor beras juga akan rendah. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri mengingat bahwa seluruh penduduk Indonesia mengkonsumsi beras dalam jumlah besar dan setengah dari total pendapatan mereka dihabiskan untuk bahan-bahan makanan. Tingginya pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan besarnya konsumsi beras membuat permintaan beras semakin meningkat yang mengharuskan untuk melakukan impor beras (Kementerian Pertanian RI, 2021).

2.3 Pengaruh Kurs terhadap Impor Beras Kurs

Secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap impor beras di Indonesia tahun 2006-2020. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai tukar maka semakin rendah impor beras ke Indonesia atau semakin besar penurunan impor beras. Sebaliknya jika nilai tukar rendah, impor beras akan tinggi. Impor sangat dipengaruhi oleh nilai tukar karena setiap negara menggunakan mata uang yang berbeda saat melakukan perdagangan internasional, nilai tukar berfungsi sebagai fasilitator dengan memungkinkan negara untuk membandingkan nilai mata uang mereka satu sama lain (Bank Indonesia, 2021).

2.4 Pengaruh Harga Beras Lokal terhadap Impor Beras

Harga Beras Lokal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap impor beras di Indonesia tahun 2006-2020. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi harga beras lokal, maka semakin besar pula jumlah beras yang diimpor ke Indonesia. Sebaliknya, jika

harga beras lokal rendah maka impor beras menurun. Hal ini dapat ditunjukkan dengan fakta bahwa perubahan tingkat harga beras lokal akan berdampak pada volume beras yang diimpor. Dapat dilihat bahwa harga beras impor seringkali lebih murah daripada harga beras lokal. Mengingat beras merupakan produk yang esensial, maka masyarakat berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan berasnya

3. Dampak Impor Beras terhadap Keseimbangan Ekonomi

Impor beras memiliki dampak positif maupun negatif terhadap keseimbangan ekonomi. Tergantung pada faktor yang berkaitan seperti volume impor, harga internasional, kebijakan pemerintah, dan kondisi pasar

3.1 Dampak Positif

3.1.1 Stabilitas Harga

Saat produksi beras dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan, impor dapat membantu menghindari lonjakan harga yang tajam, sehingga konsumen atau masyarakat dapat membeli dengan harga yang stabil (Zulfan, 2017)

3.1.2 Ketahanan Pangan

Produksi domestik yang terganggu oleh bencana alam, perubahan iklim atau lainnya, impor beras akan menjadi solusi yang cepat dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat (Suwandi dan Dewi, 2019)

3.1.3 Diversifikasi Pangan

Impor beras dapat membantu mendiversifikasi sumber pasokan untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu atau beberapa sumber, sehingga Indonesia tahan terhadap fluktuasi produksi atau harga di negara pemasok (Hartoyo, 2020)

3.2 Dampak Negatif

3.2.1 Tekanan Pada Petani Lokal

Impor yang meningkat, akan menjadi tekanan bagi para petani yang akan kesulitan bersaing dengan harga beras impor yang cenderung lebih murah. Hal ini juga dapat merugikan kesejahteraan para petani lokal (Prasetyo, 2018)

3.2.2 Defisit Neraca Perdagangan

Impor berlebihan akan memperburuk defisit neraca perdagangan, ditambah dengan ekspor yang tidak meningkat secara signifikan, akan mempengaruhi stabilitas ekonomi makro dan nilai tukar mata uang (Wibowo, 2021)

3.2.3 Ketergantungan pada Luar Negeri

Ketergantungan akan menjadi masalah jangka panjang. Jika terjadi gangguan pada pasokan internasional atau terjadi perubahan kebijakan negara-negara pemasok, maka Indonesia akan mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan beras (arifin, 2019)

3.2.4 Pengeluaran Devisa

Impor beras akan menyebabkan pengeluaran devisa yang cukup besar. Uang yang digunakan dapat mengurangi cadangan devisa negara yang seharusnya dapat digunakan

untuk investasi dalam sektor yang produktif

4. Peran Pemerintahan dan Kebijakan Mengatasi Impor Beras Untuk Keseimbangan Ekonomi

Peningkatan produksi beras terkendala kecilnya kapasitas petani dan kemiskinan. Skala usaha yang dikelola petani relatif sempit/kecil. Rata-rata luas garapan petani padi hanya sebesar 0,3 hektar. Di samping itu, sebagian besar petani padi belum sejahtera dengan pendapatan rata- rata petani dari usahatani padi hanya sekitar 30 persen dari total pendapatan keluarganya. Sekitar 70 persen petani khususnya buruh tani dan petani skala kecil termasuk golongan masyarakat miskin dan sekitar 60 persen petani padi adalah net consumer beras (Suryana dan Kariyasa, 2008).

Beras merupakan komoditas dengan permintaan yang inelastis, yaitu perubahan harga hampir tidak menyebabkan perubahan jumlah permintaan konsumen. Apabila ketersediaan kurang, harga cenderung naik sehingga tidak terjangkau oleh konsumen, khususnya masyarakat berpendapatan rendah/ miskin (Haryati dan Hendrati, 2010). Kebijakan impor beras dapat menstabilkan harga beras dalam waktu relatif singkat. Di sisi lain, Pemerintah perlu memperhatikan kepentingan petani padi dalam rangka peningkatan produksi padi guna menjaga stabilitas harga bahan makanan dalam jangka panjang (Widiarsih; 2012, dan Hessie; 2009)

Pemerintah dapat menetapkan kebijakan perdagangan internasional, termasuk di bidang impor. Melalui kebijakan di bidang impor tersebut Pemerintah mempengaruhi struktur, komposisi, dan kelancaran usaha untuk melindungi/mendorong perekonomian domestik dan penghematan devisa (Febriyanti, 2012). Salah satu sumber penerimaan perpajakan dalam APBN berasal dari bea Masuk. Undang Undang 17/2006 mendefinisikan bea masuk sebagai pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Timbulnya kewajiban pembayaran bea masuk ketika barang impor masuk ke dalam daerah pabean seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pengenaan tarif impor atau Bea Masuk umumnya digunakan Pemerintah sebagai proteksi atas sektor/bidang ekonomi tertentu sesuai dengan potensi ekonomi nasional yang akan dikembangkan. Di samping berfungsi untuk mengatur (fungsi regulerend), tarif bea masuk bertujuan sebagai salah satu sumber penerimaan negara (fungsi budgeter) dan fungsi pemerataan (pemerataan distribusi pendapatan nasional) (Hardono, dkk 2004).

Pemberlakuan bea masuk akan memberikan penerimaan kepada pemerintah dan meningkatkan surplus atau keuntungan produsen. Mengingat bea masuk merupakan pajak tidak langsung, beban tarif impor atau bea masuk akan ditransfer ke produk, mendorong kenaikan harga produk, sehingga mengurangi surplus atau keuntungan konsumen dan kesejahteraan secara umum (Hardono, dkk 2004). Tujuan dari kebijakan bea masuk adalah: 1) peningkatan pendapatan petani dan produksi beras, 2) mengamankan kebijakan harga dasar gabah yang ditetapkan pemerintah, 3) stabilisasi harga dalam negeri, dan 4) meminimumkan beban anggaran pemerintah untuk mengamankan harga dasar (Haryati dan

Hendrati, 2010).

Produksi beras berfluktuasi mengikuti pola tanam, sementara konsumsi beras stabil sepanjang tahun. Surplus beras meningkat pada masa panen (bulan Februari-April), sementara pada musim kemarau dan musim tanam (Oktober-Januari) mengalami defisit. Harga beras berpotensi turun ketika produksi melimpah (musim panen) yang merugikan petani, dan sebaliknya harga beras akan naik pada saat defisit yang merugikan konsumen sehingga harga beras akan bergejolak sepanjang tahun. Untuk mengatasi permasalahan terjadi gap antara produksi dan konsumsi, pemerintah mengizinkan impor beras (Prastowo, dkk 2008).

Adapun impor beras terutama berasal dari Vietnam, Thailand, China, India, Pakistan, dan Amerika Serikat. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/3/2014 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras, mengatur jenis beras yang dapat diimpor meliputi: 1) Impor beras untuk keperluan stabilisasi harga, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin, dan kerawanan pangan, 2) Impor beras untuk bahan baku/penolong (kebutuhan industri), dan 3) Impor beras untuk konsumsi kesehatan (dietary) dan khusus/segmen tertentu.

Pihak-pihak yang dapat melakukan impor beras adalah: Bulog, Importir Produsen Beras, Importir Terdaftar Beras, serta Lembaga Sosial atau Badan Pemerintah.

Harga beras impor lebih rendah daripada harga eceran beras lokal medium. Pada tahun 2022, selisih harga beras impor dengan beras domestik semakin lebar dan lebih rendah daripada harga beras domestik di level produsen. Dengan adanya Bea masuk impor beras yang ditetapkan pemerintah, maka selisih antara beras impor dan beras domestik mengecil sehingga menjaga daya saing beras domestik dan melindungi pendapatan/kesejahteraan petani padi. Kebijakan bea masuk beras berkontribusi dalam mempertahankan tingkat keuntungan petani padi relatif tinggi. Usaha tanaman padi sawah memiliki tingkat profitabilitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tanaman padi ladang, jagung dan kedelai.

Kebijakan bea masuk beras dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap kepentingan pendapatan atau keberlangsungan usaha tani padi domestik. Oleh karena itu, kebijakan bea masuk beras masih diperlukan untuk melindungi usaha pertanian subsektor tanaman padi. Dari sisi pendekatan pembangunan sosial, kebijakan bea masuk beras mendukung pemberdayaan petani. Kebijakan tersebut mendukung keberlangsungan usaha tani padi sehingga memperbesar kesempatan kerja dalam rangka pemberdayaan penduduk miskin, khususnya di pedesaan.

Untuk mengurangi ketergantungan pada impor beras, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan beberapa kebijakan dan inisiatif strategis, antara lain:

- 1. Intensifikasi Pertanian: Melalui program intensifikasi pertanian, pemerintah mendorong penggunaan teknologi modern, benih unggul, dan pupuk berkualitas untuk meningkatkan produktivitas padi per hektar. Program ini juga mencakup pengelolaan air yang lebih baik dan pemberian dukungan teknis kepada petani.
- 2. Ekstensifikasi Lahan Pertanian: Pemerintah mengupayakan pembukaan lahan pertanian baru dan optimalisasi lahan tidur agar dapat digunakan untuk penanaman padi
- 3. Subsidi Benih dan Pupuk: Pemerintah memberikan subsidi benih dan pupuk kepada petani untuk meringankan biaya produksi dan mendorong penggunaan input pertanian yang berkualitas.
- 4. Asuransi Pertanian: Penyediaan asuransi bagi petani untuk melindungi mereka dari risiko gagal panen akibat bencana alam atau serangan hama
- 5. Inovasi Varietas Padi: Investasi dalam penelitian untuk menghasilkan varietas padi baru yang lebih tahan terhadap hama, penyakit, dan perubahan iklim, serta memiliki produktivitas tinggi.
- 6. Pengembangan Teknologi Pertanian: Mendorong inovasi teknologi pertanian yang dapat diterapkan di tingkat petani untuk meningkatkan hasil dan efisiensi produksi.

KESIMPULAN

Beras adalah komoditas inelastis dimana perubahan harga hampir tidak menyebabkan perubahan jumlah permintaan konsumen. Apabila ketersediaan kurang, harga cenderung naik sehingga tidak terjangkau oleh konsumen, khususnya masyarakat berpendapatan rendah/ miskin. Produktivitas beras di Indonesia mengalami fluktuasi yang mengakibatkan indonesia harus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan. Namun dengan adanya kegiatan impor beras ini secara tidak langsung petani beras domestik harus bersaing dengan beras impor yang akan mengakibatkan kesenjangan sosial karena tidak dapat bersaing secara harga dimana harga beras impor lebih rendah daripada harga eceran beras lokal medium. Pada tahun 2022, selisih harga beras impor dengan beras domestik semakin lebar dan lebih rendah daripada harga beras domestik di level produsen. Diberlakukannya bea masuk, diharapkan pemerintah dapat melindungi petani domestik dengan tujuan 1) Impor beras untuk keperluan stabilisasi harga, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin, dan kerawanan pangan, 2) Impor beras untuk bahan baku/penolong (kebutuhan industri), dan 3) Impor beras untuk konsumsi kesehatan (dietary) dan khusus/segmen tertentu. Pihak-pihak yang dapat melakukan impor beras adalah: Bulog, Importir Produsen Beras, Importir Terdaftar Beras, serta Lembaga Sosial atau Badan Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Adawiyah, Anisah Luthpi, et al. "Jurnal Pendidikan dan Konseling." Keseimbangan Ekonomi terhadap Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perspektif

- Islam, vol. 4, no. 6, 2022, p. 3312.
- Arifin, B. (2019). Ketergantungan Impor Beras di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pertanian, 12(1), 45-60.
- Hartoyo, S. (2020). Diversifikasi Sumber Pasokan Beras: Studi Kasus Indonesia. Jurnal Pangan dan Gizi, 8(2), 101-115.
- Prasetyo, A. (2018). Dampak Impor Beras Terhadap Petani Lokal di Indonesia. Jurnal Agribisnis, 6(1), 77-92.
- Rahayu, Sri Endang, and Hastina Febriaty. "Prosiding Seminar Kewirausahaan." *Analisis Perkembangan Produksi Beras dan Impor Beras Di Indonesia*, 2019, p. 220.

Santoso, I. (2020). Pengeluaran Devisa dan Ketahanan Pangan: Studi Kasus Impor Beras.

Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 9(2), 134-150.

Saputra, D. (2021). Pembangunan Infrastruktur Pertanian dan Efisiensi Produksi Beras.

Jurnal Teknik Pertanian, 10(1), 89-102.

- Setiawan, M. (2020). Kebijakan Subsidi dan Dukungan Teknis untuk Petani Beras. Jurnal Kebijakan Pertanian, 7(1), 66-78.
- Suwandi, T., & Dewi, R. (2019). Impor Beras dan Ketahanan Pangan Nasional. Jurnal Ketahanan Nasional, 11(1), 33-47.
- Wibowo, S. (2021). Defisit Neraca Perdagangan dan Impor Beras di Indonesia. Jurnal Ekonomi Makro, 14(2), 117-130.
 - Yuliana, R. (2021). Diversifikasi Pangan: Upaya Mengurangi Ketergantungan pada Beras.
 - Jurnal Pangan dan Nutrisi, 10(2), 142-158.
- Zulfan, H. (2017). Stabilitas Harga Beras melalui Kebijakan Impor. Jurnal Ekonomi Pertanian, 9(1), 21-35.